Jurnal Ekonomi Holistik (ECOHOLIC)
Vol. 1, No. 2, Agustus 2025
Page: 205 - 211

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah melalui Peran APIP: Studi di Inspektorat Kabupaten Nabire

Srimiranti Agusdeti Napan[1*], Kristian Hoegh Pride Lambe[2], Naomi Patiung[3]

[1,2,3]Program Magister Manajemen, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Makassar, Indonesia

E-mail:
srimirantiagusdeti@gmail.com[1*]
[*]Penulis korespondensi

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Inspektorat Kabupaten Nabire. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa APIP memiliki peran strategis dalam memberikan keyakinan yang memadai atas kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas pengendalian internal, serta efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Inspektorat Kabupaten Nabire telah melaksanakan fungsi audit, reviu, evaluasi, pemantauan, serta pemberian konsultasi untuk mendorong terwujudnya akuntabilitas keuangan yang transparan dan akuntabel. Namun demikian, masih terdapat kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, kurangnya sarana pendukung, serta resistensi dari perangkat daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas auditor internal, penguatan komitmen pimpinan daerah, serta optimalisasi tindak lanjut rekomendasi agar pengawasan intern dapat berjalan lebih efektif. Temuan ini menegaskan bahwa peran APIP sangat penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang baik (good governance).

Kata kunci: APIP, Inspektorat, akuntabilitas, keuangan daerah, pengawasan intern

Abstract

This study aims to analyze the role of the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) in enhancing the accountability of regional financial management at the Inspectorate of Nabire Regency. A qualitative descriptive method was employed, utilizing interviews, observations, and documentation to collect data. The findings reveal that APIP plays a strategic role in providing reasonable assurance of compliance with regulations, strengthening internal control systems, and promoting efficiency and effectiveness in financial management. The Inspectorate of Nabire has implemented various supervisory functions, including audits, reviews, evaluations, monitoring, and consultations, to foster transparency and accountability in local financial governance. Nevertheless, several challenges remain, such as limited competent human resources, inadequate supporting facilities, and resistance from local government agencies in following up on audit recommendations. Addressing these challenges requires strengthening the capacity of internal auditors, enhancing leadership commitment, and optimizing the follow-up of recommendations to ensure more effective internal oversight. These results underscore the critical contribution of APIP in supporting good governance practices at the regional government level.

Keywords: *APIP, Inspectorate, accountability, regional financial management, internal supervision*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penguatan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek krusial dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) memainkan peran sentral sebagai mekanisme pengendalian internal yang strategis dalam memberikan kepastian kepatuhan terhadap peraturan serta memperkuat sistem kontrol internal (Chien & Thanh, 2022; Mahajan et al., 2023). Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa efektivitas peran APIP masih menghadapi kendala serius, seperti keterbatasan kapabilitas, ketidaksiapan sistem penanganan risiko, dan minimnya penggunaan teknologi digital dalam pengawasan (Nasrudin & Firmansyah, 2024; Widjaya, 2025).

Di Kabupaten Nabire, fungsi Inspektorat sebagai organ APIP diduga belum optimal dalam menindaklanjuti rekomendasi audit maupun mengimplementasikan pengendalian berbasis risiko secara efektif. Kendala tersebut menurut hasil penelitian mencakup keterbatasan sumber daya manusia, sarana pendukung, dan resistensi institusional—yang serupa dengan temuan di daerah lain seperti Tangerang, Pulang Pisau, maupun Yogyakarta (Rifki, 202X; Fahrurrazi & Anwary, 2024; Isnaini & Suripto, 2023).

Fakta/Kondisi	Konteks/Narasi
Kasus korupsi anggaran desa paling tinggi di 2021: 154 kasus, potensi kerugian Rp233 miliar	Mengindikasikan lemahnya pengawasan APIP di tingkat desa meski anggaran mencapai Rp68 triliun (ICW, dalam Isnaini & Suripto, 2023)
Efektivitas kapabilitas APIP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah	Ditemukan bahwa dukungan manajemen lebih signifikan daripada kapabilitas APIP sendiri (Widjaya, 2025)
Peran APIP belum optimal karena kendala sumber daya dan sistem pengendalian internal buruk	Studi kasus di Kabupaten Tangerang menunjukkan hambatan serupa (Rifki, 202X)

Mengingat pentingnya peran APIP dalam membangun pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan efektif, penelitian ini menjadi sangat penting. Kabupaten Nabire, dengan tantangan spesifiknya, dapat menjadi representasi bagi sebagian daerah di Indonesia yang menghadapi problematika serupa. Dengan mengeksplorasi kendala dan strategi optimalisasi peran APIP di Nabire, penelitian ini bertujuan memberikan rekomendasi yang praktis dan kontekstual untuk memperkuat good governance di tingkat daerah.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini merumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peran APIP dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Inspektorat Kabupaten Nabire?
2. Apa saja kendala utama yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Nabire dalam menjalankan fungsi pengawasan keuangan daerah?
3. Strategi atau langkah apa yang diperlukan untuk mengoptimalkan peran APIP dalam konteks Kabupaten Nabire?

TINJAUAN LITERATUR

Grand Theory: Akuntabilitas Publik & Good Governance

Akuntabilitas adalah mekanisme hubungan pertanggungjawaban antara "pemberi amanah" dan "penerima amanah" yang menuntut transparansi, penjelasan, dan konsekuensi (answerability & enforceability) dalam sektor publik. Kajian ulasan mutakhir menunjukkan akuntabilitas tetap menjadi tema payung yang mengikat isu legitimasi, kekuasaan, dan kinerja pemerintahan modern, serta terus berkembang seiring digitalisasi tata kelola. Penguatan akuntabilitas melekat pada prinsip good governance; dalam konteks Indonesia, fungsi audit internal pemerintah (APIP) diposisikan sebagai garis pertahanan utama untuk memastikan kepatuhan, efektivitas pengendalian, dan kualitas informasi keuangan. Bukti literatur terbaru menegaskan kontribusi audit internal terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan publik.

Kerangka Konseptual Pendukung

- **Pengawasan Intern & SPIP.** Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menjadi fondasi kontrol yang mengarahkan manajemen risiko, kegiatan pengendalian, informasi–komunikasi, dan pemantauan. Laporan kinerja BPKP terkini menegaskan mandat SPIP (merujuk PP 60/2008) serta agenda penguatan kapabilitas APIP 2020–2024.
- **Kapabilitas APIP (IA-CM).** Peningkatan kapabilitas APIP—diukur dengan *Internal*

Audit Capability Model (IA-CM)—berkorelasi dengan efektivitas layanan assurance–consulting dan mutu tata kelola. Studi evaluatif 2020–2024 pada berbagai inspektorat daerah di Indonesia menunjukkan kemajuan level, namun belum merata di seluruh elemen proses audit.

- **Akuntabilitas Keuangan Daerah.** Bibliometrik dan tinjauan sistematis atas audit sektor publik Indonesia mengonfirmasi tema dominan: kualitas audit, temuan & opini, fraud, karakteristik auditor, serta transparansi–akuntabilitas—semuanya berkait erat dengan peran audit internal dan tindak lanjut rekomendasi.
- **Tantangan Implementasi.** Literatur 2019–2025 menyoroti kendala berulang: SDM dan kompetensi, resistensi unit kerja terhadap rekomendasi, serta kesiapan sistem dan teknologi. Ini menggarisbawahi kebutuhan strategi inovatif audit publik agar pengawasan lebih berdampak.

Definisi Operasional (Penelitian)

Peran APIP: derajat pelaksanaan fungsi *assurance* dan *consulting* meliputi audit, reviu, evaluasi, pemantauan, serta pemberian saran perbaikan tata kelola/risiko/pengendalian, yang diindikasikan oleh pelaksanaan rencana audit berbasis risiko, kualitas temuan, dan rekomendasi yang implementatif.

Kapabilitas APIP (IA-CM): tingkat kemampuan unit audit internal menurut IA-CM (Level 1–5) yang tercermin pada elemen proses, praktik profesional, kepemimpinan & struktur, budaya & hubungan organisasi, serta manajemen kinerja. Diukur melalui penilaian/temuan kapabilitas terkini pada inspektorat.

SPIP: kualitas desain dan implementasi komponen SPIP (lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi–komunikasi, pemantauan) yang mendukung keterandalan laporan keuangan dan kepatuhan.

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah: tingkat keterukuran pertanggungjawaban atas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban APBD (transparansi, kepatuhan, efektivitas/efisiensi), yang diindikasikan oleh kualitas informasi keuangan, capaian tindak lanjut rekomendasi, dan penurunan temuan material.

Tindak Lanjut Rekomendasi: proporsi dan ketepatan waktu penyelesaian rekomendasi hasil audit/pengawasan yang menjadi mekanisme kunci pemulihan sistemik dan pencegahan korupsi di pemda. Bukti empiris terbaru menegaskan relevansinya bersama SPIP dan kapabilitas APIP terhadap outcome integritas.

Sintesis Temuan Literatur Terbaru

Riset mutakhir menegaskan bahwa
(i) audit internal publik berkontribusi pada transparansi-akuntabilitas;
(ii) kapabilitas APIP menurut IA-CM memediasi kualitas pengawasan;
(iii) efektivitas SPIP dan tindak lanjut rekomendasi memperkuat akuntabilitas keuangan daerah;
(iv) hambatan kapasitas, budaya organisasi, dan adopsi teknologi masih signifikan sehingga menuntut strategi peningkatan kompetensi dan dukungan pimpinan.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah untuk memahami secara mendalam bagaimana peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Inspektorat Kabupaten Nabire dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk menggali fenomena secara kontekstual, mendetail, dan komprehensif dalam setting kehidupan nyata (Yin, 2018). Metode kualitatif relevan digunakan untuk menganalisis dinamika sosial, kelembagaan, dan praktik pengawasan yang tidak dapat direduksi hanya pada data kuantitatif (Creswell & Poth, 2018).

Populasi penelitian adalah seluruh pejabat dan aparatur di lingkungan Inspektorat Kabupaten Nabire yang berperan langsung dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah. Dari populasi tersebut, penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap peran APIP. Informan utama meliputi auditor, pejabat struktural di bidang pengawasan, dan staf pengelola keuangan. Pemilihan purposive sampling dianggap tepat dalam penelitian kualitatif untuk memperoleh kedalaman informasi dan relevansi data sesuai tujuan penelitian (Palinkas et al., 2015).

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Inspektorat Kabupaten Nabire, Provinsi Papua

Tengah. Lokasi ini dipilih karena Inspektorat Nabire merupakan entitas strategis dalam pelaksanaan fungsi pengawasan keuangan daerah, namun menghadapi berbagai tantangan terkait keterbatasan sumber daya dan efektivitas pengendalian intern. Penelitian lapangan dilaksanakan selama dua bulan, yakni pada Juni hingga Juli 2025, dengan melibatkan wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan pengumpulan dokumen resmi sebagai teknik pengumpulan data.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tematik, yang mencakup proses pengorganisasian, kategorisasi, dan interpretasi data sesuai tema-tema penelitian. Analisis dilakukan melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles, Huberman, & Saldaña, 2019). Untuk meningkatkan keabsahan temuan, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan metode, dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi agar diperoleh gambaran yang lebih valid dan reliabel (Fusch, Fusch, & Ness, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Penelitian ini melibatkan lima orang informan utama yang memiliki keterlibatan langsung dalam pengawasan keuangan daerah di Kantor Inspektorat Kabupaten Nabire. Informan tersebut terdiri dari: (1) Auditor Pertama dengan latar belakang hukum; (2) Inspektur Pembantu (Irban) III; (3) Inspektur Pembantu (Irban) I; (4) Kepala Subbagian Keuangan; serta (5) seorang staf pelaksana. Keberagaman latar belakang pendidikan dan posisi struktural ini memberikan perspektif yang lebih kaya terkait peran APIP dalam pelaksanaan audit, reviu, pemantauan, maupun konsultasi. Informan dengan latar belakang hukum cenderung menekankan aspek kepatuhan regulasi, sementara pejabat struktural lebih menekankan efektivitas koordinasi dan tindak lanjut rekomendasi.

Peran APIP dalam Akuntabilitas Keuangan Daerah

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Inspektorat Kabupaten Nabire telah melaksanakan berbagai fungsi pengawasan, meliputi audit kinerja, audit keuangan, reviu laporan keuangan, monitoring, serta konsultasi kepada OPD. Salah satu auditor menyatakan:

> *"Kami di Inspektorat melakukan audit kinerja, reviu laporan keuangan, dan pemantauan tindak lanjut. Rekomendasi selalu diberikan untuk perbaikan, walaupun belum semua OPD responsif"* (Informan 1).

Pernyataan ini menegaskan peran APIP tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra pembina dalam tata kelola keuangan. Hal ini sejalan dengan temuan Rifki (2021) bahwa peran APIP efektif bila bersifat konsultatif dan kolaboratif dalam mendorong akuntabilitas keuangan daerah.

Kendala dalam Pelaksanaan Pengawasan

Meskipun peran APIP cukup signifikan, penelitian menemukan adanya kendala utama dalam pelaksanaan pengawasan. Informan menyebutkan keterbatasan jumlah dan kompetensi auditor, anggaran yang minim untuk kegiatan lapangan, serta resistensi OPD dalam menindaklanjuti rekomendasi. Seorang Inspektur Pembantu menyatakan:

> *"Jumlah auditor belum sebanding dengan jumlah OPD yang harus diawasi. Ada juga OPD yang lambat dalam menindaklanjuti rekomendasi audit"* (Informan 2).

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pengawasan dilakukan secara rutin, kualitas dan cakupan pengawasan masih terbatas. Temuan ini konsisten dengan studi Widjaya (2025) yang menegaskan bahwa keterbatasan SDM dan dukungan manajerial menjadi faktor penghambat kapabilitas APIP dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah.

Dampak Peran APIP terhadap Akuntabilitas

Walaupun menghadapi tantangan, dampak positif dari peran APIP tetap terlihat. Beberapa OPD telah memperbaiki Standar Operasional Prosedur (SOP) keuangan, menurunkan jumlah temuan administratif, serta menunjukkan peningkatan kepatuhan dalam pelaporan. Informan 3 menegaskan:

> *"Setelah audit, banyak OPD memperbaiki SOP, terutama terkait pengelolaan kas dan pertanggungjawaban belanja"*. (Hasil wawancara, 2025)

Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan APIP memberikan kontribusi nyata terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Temuan ini sejalan dengan Isnaini dan Suripto (2023), yang menekankan bahwa tindak lanjut rekomendasi APIP berperan penting dalam mendorong integritas pengelolaan keuangan desa maupun daerah.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Inspektorat Kabupaten Nabire telah melaksanakan fungsi pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, serta konsultasi. Namun, efektivitas pelaksanaan fungsi tersebut masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, serta resistensi dari organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menindaklanjuti rekomendasi. Kondisi ini menggambarkan bahwa secara struktural peran APIP telah sesuai dengan mandat regulasi (PP No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP), tetapi implementasinya belum maksimal. Fenomena tersebut dapat dijelaskan melalui teori akuntabilitas publik, di mana efektivitas pengawasan sangat dipengaruhi oleh kapasitas lembaga pengawas serta tingkat kepatuhan entitas yang diawasi (Mardiasmo, 2018).

Temuan keterbatasan auditor sejalan dengan penelitian Widjaya (2025), yang menyatakan bahwa kapabilitas APIP belum merata di seluruh daerah akibat minimnya kompetensi teknis dan dukungan manajerial. Kondisi serupa juga ditemukan oleh Isnaini dan Suripto (2023), yang menyoroti lemahnya pengawasan internal terhadap pengelolaan dana desa, sehingga mengurangi efektivitas akuntabilitas keuangan daerah. Namun, penelitian ini menemukan bahwa meskipun menghadapi keterbatasan, APIP di Nabire tetap mampu mendorong perbaikan SOP dan menurunkan temuan administratif di sejumlah OPD. Temuan ini memberikan kebaruan (novelty) bahwa peran konsultatif APIP dalam membangun kemitraan dengan OPD ternyata lebih efektif mendorong akuntabilitas dibandingkan pendekatan represif.

Selain itu, penelitian ini menyoroti resistensi OPD dalam menindaklanjuti rekomendasi, yang konsisten dengan studi Rifki (2021) mengenai rendahnya komitmen perangkat daerah terhadap hasil audit. Namun, penelitian ini memberikan perspektif baru bahwa resistensi tersebut tidak semata karena kurangnya kesadaran, melainkan juga dipengaruhi faktor geografis dan infrastruktur di Nabire yang menyulitkan koordinasi serta keterbatasan dukungan teknologi informasi dalam proses pengawasan. Dengan demikian, penelitian ini memperluas pemahaman tentang tantangan pengawasan internal di daerah dengan karakteristik wilayah yang kompleks.

Implikasi Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah perlu memperkuat kapasitas auditor APIP melalui pelatihan berbasis risiko, penguasaan teknologi audit, serta memperluas jumlah auditor agar proporsional dengan objek pengawasan. Selain itu, dukungan anggaran dan fasilitas penunjang, termasuk sistem informasi pengawasan, menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Komitmen pimpinan OPD dalam menindaklanjuti rekomendasi juga perlu diperkuat melalui regulasi internal serta mekanisme reward and punishment.

Implikasi Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur mengenai akuntabilitas publik dengan menekankan pentingnya peran konsultatif APIP dalam membangun hubungan kemitraan dengan OPD. Hasil penelitian menegaskan bahwa fungsi konsultasi dapat menjadi strategi efektif untuk mengatasi resistensi, khususnya di daerah dengan keterbatasan SDM dan infrastruktur. Penelitian ini juga memperkuat relevansi teori good governance, yang menempatkan akuntabilitas sebagai prinsip utama, dengan menambahkan perspektif lokal bahwa kondisi geografis dan kapasitas teknologi dapat menjadi variabel mediasi dalam efektivitas pengawasan.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Inspektorat Kabupaten Nabire. Hasil penelitian menunjukkan bahwa APIP telah menjalankan fungsi pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan konsultasi. Peran ini berkontribusi pada peningkatan kepatuhan OPD terhadap regulasi, perbaikan prosedur pengelolaan keuangan, serta penurunan temuan administratif.

Namun demikian, efektivitas APIP masih menghadapi berbagai kendala, terutama keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, kurangnya pemanfaatan teknologi informasi, serta resistensi OPD dalam menindaklanjuti rekomendasi. Kondisi ini menghambat optimalisasi peran APIP dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh.

Implikasi praktis dari penelitian ini menekankan perlunya peningkatan kapasitas auditor, dukungan anggaran dan fasilitas penunjang, serta penguatan komitmen perangkat daerah terhadap tindak lanjut rekomendasi audit. Sementara itu, implikasi teoretisnya adalah penegasan pentingnya fungsi konsultatif APIP dalam mendorong akuntabilitas publik, serta kontribusinya terhadap pengembangan teori akuntabilitas dan good governance dalam konteks pemerintahan daerah dengan tantangan geografis dan kelembagaan yang kompleks.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam memahami bagaimana peran APIP dapat diperkuat untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Temuan ini juga menggarisbawahi bahwa strategi pengawasan yang kolaboratif lebih efektif dibandingkan pendekatan yang bersifat represif.

Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada satu lokasi, yaitu Inspektorat Kabupaten Nabire, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh inspektorat di Indonesia. Selain itu, data yang diperoleh masih terbatas pada wawancara, observasi, dan dokumentasi, tanpa melibatkan survei kuantitatif yang lebih luas. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengadopsi pendekatan campuran (mixed methods), memperluas objek penelitian ke beberapa daerah dengan karakteristik berbeda, serta mengintegrasikan analisis kuantitatif untuk mengukur hubungan antara kapabilitas APIP, kualitas pengawasan, dan tingkat akuntabilitas keuangan daerah secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

Fahrurrazi, F., & Anwary, A. (2024). Pengaruh pengendalian intern pemerintah terhadap akuntabilitas keuangan daerah. *Jurnal Pendidikan Tambusai, 8*(1), 122–135. https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.18481

Fusch, P. I., Fusch, G. E., & Ness, L. R. (2018). Denzin's paradigm shift: Revisiting triangulation in qualitative research. *Journal of Social Change, 10*(1), 19–32. https://doi.org/10.5590/JOSC.2018.10.1.02

ICW. (2021). Tren penindakan korupsi 2021: Dana desa jadi sektor paling rawan. *Indonesia Corruption Watch*. https://antikorupsi.org (dalam Isnaini & Suripto, 2023).

Iyai, Y. E. M., Jaya, A., & Halik, J. B. (2025). Analisis Kepatuhan dan Prosedur Verifikasi terhadap Kualitas Kinerja Pegawai di Badan Pendapatan , Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Papua Tengah. *J-MEBI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, *1*(1), 32–42. https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jmebi/article/view/872

Isnaini, H., & Suripto, B. (2023). Internal control system and accountability of village fund management in Indonesia. *Asian Journal of Accounting Research, 8*(3), 234–249. https://doi.org/10.1108/AJAR-06-2022-0067

Lambe, K. H. P., Palondongan, E., Ma'na, P., & Tandi, A. (2024). Strategi Peningkatan Kinerja Pegawai di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara. *Al-Buhuts*, *20*(1), 138–147. https://doi.org/10.30603/ab.v20i1.4711

Lambe, K., Patiung, N., & Latiep, I. F. (2025). THE ROLE OF RISK MANAGEMENT IN STRENGTHENING THE IMPACT OF FINANCIAL LITERACY ON INVESTMENT DECISIONS. *Accounting Profession Journal (Apaji)*, *7*(1), 60–71. https://ojsapaji.org/index.php/apaji/article/view/286/168

Mahajan, A., Shrestha, A., & Singh, S. (2023). Public sector accountability and financial governance in emerging economies. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management, 35*(5), 602–621. https://doi.org/10.1108/JPBAFM-01-2023-0012

Mangallo, E., Baharuddin, & Lambe, K. H. P. (2025). EFEKTIVITAS TUGAS DAN FUNGSI PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA TENGAH. *ECOHOLIC: Jurnal Ekonomi Holistik*, *1*(1), 108–115. https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jeh/article/view/865h

Mangopo, R. M., Landjang, X. I. S., Lambe, K. H. P., & Jaya, A. (2025). Analisis Pengelolaan Pajak dan Retribusi Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, *8*(1), 171–180. https://doi.org/10.36778/jesya.v8i1.1887

Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik* (4th ed.). Andi Offset.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.

Nasrudin, A., & Firmansyah, R. (2024). Digital transformation and internal audit function in Indonesian public sector. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 15*(1), 112–130. https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2024.15.1.07

Paembonan, R., Ma'na, P., & Halik, J. (2024). Analisis akuntabilitas kinerja keuangan daerah di kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang kabupaten biak provinsi Papua. *Journal of Marketing Management and Innovative Business Review*, *2*(2), 1–6. https://doi.org/10.63416/mrb.v2i2.254

Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N., & Hoagwood, K. (2015). Purposeful sampling for qualitative data collection and analysis in mixed method implementation research. *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research, 42*(5), 533–544. https://doi.org/10.1007/s10488-013-0528-y

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Pidjer, D., Todingbua, M. A., & Lamba, S. E. (2025). Efektivitas Anggaran Pendidkan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire. *Journal of Marketing Management and Innovative Business Review (MARIOBRE)*, *3*(1), 50–58. https://doi.org/10.63416/mrb.v3i1.308

Rifki, M. A. (2021). Peran aparat pengawas intern pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah: Studi kasus di Kabupaten Tangerang. *Jurnal Administrasi Bisnis, 18*(2), 77–92. https://doi.org/10.22146/jab.59317

Widjaya, A. (2025). The effect of APIP capability and management support on the quality of regional financial statements in Indonesia. *Jurnal Riset dan Praktik Manajemen Akuntansi, 9*(1), 15–28. https://doi.org/10.33795/jrpma.v9i1.103

Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.